



PUTUSAN

Nomor 512/Pdt.G/2018/PA Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 8 Agustus 2018 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 512/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 8 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu di Desa Batu Lintang pada tanggal 12 Juni 2010 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 163/11/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 5 Juli 2010;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang empat tahun lima bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- **Anak ke 1** , perempuan, lahir pada tanggal 27 Oktober 2010;
- **Anak ke 2** , perempuan, lahir pada tanggal 29 Maret 2015, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga semua kebutuhan rumah tangga Penggugat yang menanggungnya dari gaji Penggugat;
- Ayah Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti ayah Tergugat pernah meminta Tergugat untuk menggadaikan SK Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat pernah mengambil uang di ATM milik Penggugat sebesar Rp 40.000.000,00-(empat puluh juta rupiah) dan Tergugat juga pernah menggadai surat tanah tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat, bahkan Tergugat pernah bertengkar dengan ibu Penggugat;
- Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, bahkan hingga sampai tiga minggu hari lamanya;
- Tergugat sering bermain judi togel dan judi online bersama teman-teman Tergugat;
- Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat, bahkan Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat dan anak dengan menggunakan parang jika terjadi pertengkaran dan perselisihan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 September 2015, berawal ketika orang-orang tempat Tergugat berhutang datang ke rumah kontrakan untuk menagih hutang Tergugat, bahkan dalam satu hari ada sebanyak lima orang yang datang ke rumah kontrakan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang Tergugat dan yang salah satunya mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menggadaikan tanah kepada orang tersebut sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), namun karena Tergugat tidak pernah membayar hutang Tergugat tersebut maka hutang Tergugat bertambah menjadi Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah), kemudian Penggugat menjelaskan kepada orang tersebut bahwa Penggugat tidak tahu menahu tentang hutang Tergugat tersebut dan Penggugat juga tidak tahu jika Tergugat sudah menggadaikan tanah tersebut, kemudian Penggugat langsung menelpon Tergugat dan meminta Tergugat untuk pulang ke rumah untuk menyelesaikan masalah tersebut dan Penggugat juga meminta Tergugat agar membayar hutang-hutang Tergugat dengan orang-orang tersebut, namun Tergugat tidak peduli dengan perkataan Penggugat tersebut dan Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat tidak akan pulang ke rumah, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Tebat Monok, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Peraduan Binjai;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Agustus 2018 dan 7 September 2018 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengurus surat izin untuk melakukan perceraian dengan menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 474.4-321 Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepahiang tanggal 30 Juni 2018;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/11/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 5 Juli 2010, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Sukmawati binti Ismail**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Batu Lintang,

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010, saksi hadir pada waktu acara pernikahan;
 - Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada waktu menikah adalah perawan dan jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Sidodadi Kepahiang, terakhir tinggal di rumah kontrakan di Tebat Monok;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama satu tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dulu pernah bercerai selama satu tahun ketika anak pertama berumur satu tahun, kemudian rukun dua tahun dan kemudian bertengkar lagi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, karena banyak orang yang datang menagih hutang Tergugat, dan Tergugat sering berjudi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga tahun;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tetap tidak mau berubah, dan setelah pertengkaran terakhir tidak ada lagi usaha damai;
2. **Saksi ke 2** , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS pada RSUD Curup, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong,

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PA Crp.



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010, saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada waktu menikah adalah perawan dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah kontrakan di Tebat Monok;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, dan Tergugat sering berjudi;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat, dan juga saksi pernah bertemu Tergugat di pasar yang ketika itu mengatakan baru menggadaikan motor adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tiga tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tetap tidak berubah, dan setelah pertengkaran terakhir tidak ada lagi usaha damai;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian harus mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang. Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dari Bupati Kepahiang dengan surat keputusan Nomor 474.3-321 Tahun 2018, tanggal 30 Juni 2018, dengan demikian Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 14 Agustus 2018 dan 7 September 2018 yang dibacakan di persidangan, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi setelah satu tahun pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, ayah Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan pernah minta Penggugat untuk menggadaikan SK Penggugat, Tergugat pernah menggadaikan surat tanah tanpa sepengetahuan Penggugat, kurangnya rasa kekeluargaan Tergugat dengan keluarga Penggugat, Tergugat sering pergi hingga satu minggu lamanya, Tergugat sering berjudi dan berbicara kasar. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 September 2015, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/11/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti (P) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang bernama **Sukmawati binti Hasim** dan **Saksi ke 2**, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama tiga tahun, keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 12 Juni 2010, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, dan Tergugat sering berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai, tidak saling mempercayai lagi antara satu dan yang lain dan juga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama tiga tahun, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki Firman Allah Surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dirumuskan bahwa *"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya"*;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama tiga tahun, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami istri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasil usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta dengan adanya keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita angka 7 pada gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan *mudharat* kepada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang rukun dan harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seiya dan sekata, tidak ada rasa kasih dan sayang lagi antara satu dengan yang lainnya, ditambah lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan-alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *ba'in sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 *Muharram* 1440 Hijriyah, oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor 512/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 9 Agustus 2018, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Marhabani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

dto.

Rogaiyah, S.Ag.

Hakim Anggota,

dto.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Marhabani, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|------------------------|------|---------|
| 1. Pendaftaran | = Rp | 30.000 |
| 2. Proses | = Rp | 50.000 |
| 3. Panggilan Penggugat | = Rp | 125.000 |

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Tergugat	= Rp 250.000
5. Redaksi	= Rp 5.000
6. Meterai	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 466.000

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. 512/Pdt.G/2018/PA Crp.